



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

2022



LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

 **Jl. Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama**

 **katingan.bawaslu.go.id**

 **Bawaslu Katingan**

 **bawaslukabkatingan@gmail.com**

LAPORAN TAHUNAN

Divisi Hukum

TAHUN 2022

BAWASLU KABUPATEN KATINGAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
SAMBUTAN	iii
BAB.1 PENDAHULUAN	1
1) LATAR BELAKANG	1
2) Maksud	
3) Tujuan Penyusunan Laporan.....	
BAB II TUGAS DIVISI HUKUM.....	2
1) Tugas Divisi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022.....	2
BAB.III. CAPAIAN HUKUM	3
1) Advokasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH).....	3
2) Kajian dan Perundang-undangan	
BAB IV. RENCANA KERJA DIVISI HUKUM T.A 2023	5
BAB V. REKOMENDASI	5
DOKUMENTASI.....	6

SAMBUTAN

(Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan)

Mengawali pengantar ini, kami seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Periode Tahun 2018–2023 mengucapkan puji syukur karena Bawaslu Kabupaten Katingan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2022 yaitu dimulainya tahapan Pendaftaran, Verifikasi, sampai dengan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Sejak dilantik pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagai badan adhoc Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dan tanggal 15 Agustus 2018 Sebagai badan permanen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, kami langsung dihadapkan pada sejumlah kompleksitas masalah pengawasan Pemilihan.

Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan Pemilihan dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilihan demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, menata sistem, struktur, kultur, personel, dan sarana-prasarana. Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Katingan membentuk Panitia Pengawas Kecamatan yang bersifat adhoc untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dilanjutkan dengan pembentukan pengawas Pemilu di tingkat desa/kelurahan, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang semuanya masih bersifat adhoc. Upaya lain adalah adanya dukungan pemerintah Kabupaten Katingan yang menunjuk ASN yang diperbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan serta memfasilitasi peminjaman sarana prasarana seperti peralatan kantor sehingga Bawaslu Kabupaten Katingan dapat melaksanakan pengawasan setiap tahapan Pemilihan yang dimulai dari tahap penetapan daftar pemilih, penetapan Partai Politik peserta Pemilihan, penetapan daftar Calon tetap, tahapan kampanye, dana kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap penetapan hasil Pemilihan. Secara umum Bawaslu Kabupaten Katingan dapat melaksanakan pengawasan di setiap tahapan Pemilihan, walaupun masih terdapat sejumlah

kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius dari jajaran pengawas Pemilu se Kabupaten Katingan pada khususnya.

Selain memaksimalkan sumber daya yang ada, juga memaksimalkan dukungan pihak terkait terutama pemerintah/lembaga melalui kerjasama antar lembaga. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Katingan juga mengoptimalkan dukungan berbagai elemen masyarakat. Seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Katingan sudah tentu perlu diinformasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Laporan Akhir Divisi Hukum Tahun 2022 seperti ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Katingan kepada publik. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu ini dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu melalui media massa, elektronik, serta melalui sosialisasi seperti rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilu sesuai dengan tahapan Pemilu.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Katingan untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Katingan, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting bagi Bawaslu dalam menetapkan kebijakan guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.

Kasongan 23 Desember 2022

Badan Pengawas pemilihan umum

Kabupaten Katingan

Ketua


Yosafat Erickto Kawung, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akhir Divisi Hukum dapat diselesaikan tepat waktu,

Kami menyadari laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu saran dan kritik demi perbaikan di masa mendatang. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan laporan akhir Divisi Hukum Tahun 2022 ini sehingga selesai tepat waktu. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kepala Sekretariat beserta staf Bawaslu Kabupaten Katingan yang telah membantu menyelesaikan laporan Akhir Divisi Hukum.

Sejatinya, Pilkada yang demokratis, jujur dan adil adalah sarana mewujudkan pemerintahan yang baik. Perhelatan Pemilihan yang berkualitas tentunya harus ditopang oleh penyelenggara Pemilu yang kompeten. Semoga ke depan, Bawaslu Kabupaten Katingan mampu menjadi lembaga Pengawal Demokrasi Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas serta Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja.

Kasongan, 23 Desember 2022

BAWASLU KABUPATEN KATINGAN

Koordinator Divisi Hukum
Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan
Masyarakat

WAHYUNI, S.Pd.I., MPd

BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bias diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Negara Indonesia mulai mengarah pada arti demokrasi yang sebenarnya. Karena sudah bias melangsungkan pemilihan presiden, anggota legeslatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diberikan pemerintah pusat. Demi menjawab seluruh keinginan dan aspirasi rakyat. Sistem pemerintahan yang semakin adil bisa dirasakan, setelah penerapan demokrasi sekarang ini. Rakyat berperan aktif dalam memilih wakil, dan para pemimpinnya secara leluasa. Harapannya keadilan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh setiap warga Indonesia. Dalam mewujudkan negara yang Demokrasi dilakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

2). Maksud

Maksud dibuat nya Laporan Akhir Divisi Hukum Tahun 2022 seperti ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Katingan kepada publik. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu ini dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu melalui media massa, elektronik, serta melalui sosialisasi seperti rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilu sesuai dengan tahapan Pemilu.

3). Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan;
3. Sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan dalam Pemilu yang akan datang;
4. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Divisi Hukum Bawaslu Republik Indonesia

BAB II

TUGAS DIVISI HUKUM

I. Tugas Divisi Hukum Dalam Pola Hubungan dan/atau Dokumen Perencanaan

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu sebagai berikut :

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Advokasi dan pendampingan hukum;
- c. Penyusunan analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- e. Pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
- h. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- i. Pengadministrasian dan pengolahan basis data peraturan perundang-undangan, analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- k. Melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- l. Sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- m. Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian manusia, organisasi, Pendidikan, dan pelatihan;
- n. pemantauan, supervise, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
- o. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

Demi penguatan kapasitas hukum Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan upaya preventif dengan melakukan persiapan pengawasan yang efektif dan efisien dalam setiap tahapan, sehingga baik peserta Pemilihan, KPU maupun Pengawas Pemilihan tidak melakukan tindakan yang menimbulkan pelanggaran dan sengketa.

BAB.III CAPAIAN HUKUM

1) Advokasi dan Dokumentasi Hukum

Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat dalam setiap tahapan. Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan kampanye Pemilihan dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melakukan analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-Undang Pemilu maupun Perbawaslu selama proses tahapan. Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai upaya perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas dengan tujuan agar terselenggaranya Pemilihan Umum yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu adalah suatu system pendayagunaan Bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat yang bermanfaat untuk menjamin keterpaduan dan integrasi dengan Unit Teknis dilingkungan Bawaslu dan instansi lain. Ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, pengembangan Kerjasama yang efektif dengan Pusat Jaringan dan antar sesama Anggota Jaringan serta meningkatkan kualitas pembangunan produk hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kab/ Kota serta peningkatan pelayanan kepada publik.

2) Kajian dan Perundang-undangan

Kehadiran Bawaslu menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilihan yang dilakukan selama proses, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu tidak mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak. Sosialisasi produk hukum Perundang-undangan baik Undang-Undang ataupun Perbawaslu perlu diberikan kepada penyelenggara pemilu termasuk juga diberikan kepada Stakeholder, Pemantau Pemilu serta umumnya kepada masyarakat dengan tujuan agar aturan-aturan yang telah ada dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

BAWASLU KABUPATEN KATINGAN				
No	Divisi	Kegiatan		Keterangan
		Pelaksanaan	Bentuk Kegiatan	
1	Divisi Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	27 April 2022	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	
2	Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	12 Agustus 2022	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 dengan Tema “Merawat Demokrasi Dengan Melawan Politik Identitas Dan Menjaga Netralitas ASN	
3	Divisi Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	13 Oktober 2022	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 dengan tema “Meningkatkan Peran Generasi Muda Dalam Pemilu Serentak Tahun 2022”	
4	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	09 sd 13 November 2022	Dalam Rangka Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2022 dengan Tema “Perempuan	

			Berdaya Mengawasi” di Luwansa Hotel Palangkaraya	
--	--	--	---	--

BAB IV
RENCANA KERJA DIVISI HUKUM T.A 2023

Rencana kerja untuk Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan berdasarkan Petunjuk Operasional Kerja Tahun anggaran 2023 serta melakukan pembinaan untuk jajaran Panwaslu Kecamatan dan sekretariat dalam persiapan menghadapi menghadapi Pemilu serentak tahun 2024

BAB V
Rekomendasi

- 1) Perlunya perencanaan anggaran yang baik terkait Divisi Hukum yang mengakomodir semua kegiatan Hukum.
- 2) Perlunya meningkatkan spesifikasi peralatan kerja computer, frinter serta pengadaan mesin foto copy, yang akan berdampak pada maksimalnya kinerja Bawaslu Kabupaten Katingan dalam pembuatan berkas penangan pelanggaran.
- 3) Perlunya membentuk pengadilan khusus Pemilihan Umum yang didesain memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran yang timbul dalam proses pemilihan, mulai dari pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya, sehingga hal ini akan menghasilkan efisiensi lembaga dan proses di dalam

Ditetapkan di : Katingan
Pada tanggal : 23 Desember 2022

BAWASLU KABUPATEN KATINGAN
Koordinator Divisi HP2H

WAHYUNI,S.Pd.I.,MPd

DOKUMENTASI









